



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Siwalima, 18 September 2018

Korupsi Uang Makan Pendopo SBB, Polisi Siapkan Bukti ke BPKP

Ambon - Penyidik Satreskrim Polres Seram Bagian Barat sementara menyiapkan dokumen dan bukti-bukti dugaan korupsi uang makan dan minum pendopo bupati dan wakil bupati tahun 2017 senilai Rp 1.020.000.000.00 untuk diserahkan kepada BPKP.

Penyidik juga sudah meminta Pemkab SBB menyerahkan surat perintah membayar (SPM) dan bukti pertanggungjawaban keuangan.

"Kita sementara meminta SPM dan bukti pembayaran lainnya. Disamping kita siapkan dokumen juga untuk diserahkan kepada BPKP untuk kepentingan audit. Kita sudah menyurat dan juga sudah koordinasi, sehingga akan ditindaklanjuti segera," jelas Kasat Reskrim Polres SBB, Iptu Richard Hahury, saat dikonfirmasi *Siwalima*, melalui telepon selulernya, Senin (17/9).

Hahury mengatakan, penyidikan tetap berjalan, dan penyidik secepatnya menyerahkan bukti dan dokumen kepada BPKP.

"Semua nanti kita siapkan dan serahkan. Intinya kasus ini jalan. Ada yang menyampaikan lambat dan lainnya, tidak benar karena kasus ini masih terus diusut," ujarnya.

Diperiksa

Ancaman tim penyidik Tipikor Satreskrim Polres SBB untuk menjemput paksa Mansur Tuharea membuat nyalinya ciut. Ia akhirnya memenuhi panggilan penyidik, Senin (10/9).

Sekda SBB ini hadir di ruang penyidik sekitar 11.30 WIT, setelah sebelumnya beberapa kali mangkir.

Tuharea diperiksa pukul 12.00 hingga 15.00 WIT, dengan 18 pertanyaan berkaitan dengan dugaan korupsi uang makan dan minum pendopo bupati dan wakil bupati tahun 2017 senilai Rp 1.020.000.000.00.

Istrinya, Ny. Rosmana Tuharea, tidak lagi diperiksa. Penyidik hanya meminta menyerahkan dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran makan minum yang dipakainya. "Untuk istrinya itu tidak lagi diperiksa, tetapi penyidik meminta laporan pertanggungjawaban keuangan yang dipakai oleh istri pa sekda," jelas Hahury.

Istri Wakil Bupati, Ny. Christina Akerina/Nanlohy juga dimintakan hal yang sama. Ia telah menyerahkan laporan pertanggungjawaban anggaran yang dipakainya.

Sementara, penyidik terpaksa mendatangi kediaman bupati untuk memeriksa istrinya, Ny. Syarifa Payapo. Langkah ini dilakukan karena ia sudah dua kali mangkir.

Syarifa Payapo diperiksa oleh penyidik pada Rabu (15/8) di kediamannya, di Piru Istri orang nomor satu di Kabupaten SBB ini diperiksa pukul 09.00 hingga 11.00 WIT, dan dicecar 20 pertanyaan.

Istri wakil bupati, Ny. Christina Akerina/Nanlohy juga sudah diperiksa pada, Selasa (5/6) lalu. Ia mendatangi Polres SBB dengan mobil Avanza silver DE 207 GM. Ia diperiksa pukul 13.15 hingga 14.30 WIT oleh Kanit Tipikor Aiptu Roby Alfons, didampingi Wakapolres Kompol Bachry Hehanussa.

Dalam pemeriksaan itu, Tin, sapaan Nanlohy mengaku menerima dana makan minum sebesar Rp. 30 juta rupiah setiap bulan.

Kantongi

Penyidik sudah mengantongi calon tersangka kasus dugaan korupsi uang makan minum pendopo bupati dan wakil bupati tahun 2017 senilai Rp 1.020.000.000.00.

Sekda Kabupaten SBB, Mansur Tuharea disebut-sebut menjadi salah satu orang bertanggung jawab dalam kasus ini.

"Dari sisi pertanggungjawaban tentunya sudah ada. Tentunya dia yang dinilai paling bertanggung jawab. Setidaknya ini soal penggunaan anggaran dan pastinya pejabat berwenang," jelas, Kasat Reskrim Polres SBB, Iptu Richard Hahury, saat dikonfirmasi *Siwalima*, Senin (3/9).



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Bantah

Sekda Mansur Tuharea juga sebelumnya telah diperiksa pada Rabu (23/5) lalu. Tuharea yang saat itu mengenakan kemeja lengan pendek putih dan celana panjang abu-abu diperiksa oleh Kanit Tipikor Polres SBB Aiptu Roby Alfons. Turut hadir Kasat Reskrim dan Wakapolres Kopol Bachry Hehanussa. Tuharea dicecar sebanyak 14 pertanyaan.

Saat diperiksa, Tuharea mengatakan, penggunaan uang makan minum di pendopo bupati sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, yang telah dirubah dengan Permendagri Nomor 1 tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan daerah. Penanganan kasus dugaan korupsi uang makan minum di pendopo Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2017 senilai Rp Rp 1.020. 000.000, ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Naiknya status kasus ini ke tahap penyidikan, berdasarkan hasil gelar perkara tim penyidik Satreskrim Polres SBB yang berlangsung pada Rabu (18/7) lalu. Gelar perkara turut dihadiri oleh Wakapolres SBB, Kopol Bachri Hehanussa.

“Dalam gelar perkara didapati hasil bahwa terdapat indikasi penyalahgunaan anggaran oleh beberapa oknum, dan dari gelar tersebut status kasusnya ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan,” jelas Kopol Bachri Hehanussa. **(S-27)**